

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, K. S. (2017). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara Tahun 2013-2016*. Skripsi. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Halim dan M. Syam Kusufi, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqsan. (2016). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. e-Journal Ilmu Pemerintahan, 230-240.
- Kharisma, V. D. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 94-103.
- Mamuaya, J. V. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal EMBA, 1020-1030.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mauliyanna, M. (2017). *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*. JOM FISIP, 1-15.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pasinringi, A. (2010). *Kebijakan Otonomi Daerah Suatu Tinjauan Filosofis*. Jurnal Academica Fisip Untad, 438-454.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi - Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Desa - Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumenge, A. S. (2013). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, 74-81.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yunianti, U. (2015). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 499-503.